

**ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR
KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2005-2009**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika & Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**CROSSANDRA UNDULIFOLIA
NIM. C2B606013**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Crossandra Undulifolia
Nomor Induk Mahasiswa : C2B606013
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN TINGKAT KETIMPANGAN
ANTAR KECAMATAN DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-
2009**

Dosen Pembimbing : Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si

Semarang, 26 Juni 2012

Dosen Pembimbing,

(Dra. Hj. Tri Wahyu Rejekiningsih, M.Si)
NIP.196602101992032001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Crossandra Undulifolia
Nomor Induk Mahasiswa : C2B606013
Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP (Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan)

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI
DAN TINGKAT KETIMPANGAN
ANTAR KECAMATAN DI
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-
2009**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 26 Juni 2012

Tim penguji :

1. Dra. Hj. Tri Wahyu R, M.Si (.....)

2. Achma Hendra Setiawan, SE,M.si (.....)

3. Drs.R.Mulyo Hendarto, MSP (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Crossandra Undulifolia, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 – 2009”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk kalimat atau rangkaian simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 26 Juni 2012

Yang membuat pernyataan,

(Crossandra Undulifolia)

NIM : C2B606013

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang-orang yang ketakutan”

PERSEMBAHAN

Kepada ALLAH SUBHANA WATA`ALA

*Yang telah Memberikan jalan, Kemudahan dan kekuatan dalam hidup ku ini
Orang Tuaku Tercinta*

*Untuk Doa serta Nasehat yang terus diberikan tanpa mengenal waktu demi
Kesuksesan dan Kebahagiaanku, Untuk kasih sayang yang tak tergantikan dari
Tiap hembusan nafasmu yang telah berlalu bersama waktu dan Tidak akan pernah
Bisa tergantikan sampai kapanpun,*

Kakaku

*Untuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari
Serta Teman-temanku yang telah membantuku dalam pembuatan skripsi ini.*

ABSTRACT

Inequality is a development problem that cannot be eliminated, especially in developing countries. Kudus regency has a high level of inequality compared to other regencies in Central Java. This study aimed to analyze the level of inequality in the inter-district in Kudus regency.

Kudus regency economic growth as a whole continues to decrease. Average economic growth Kudus regency in 2005 until 2009 approximately 3.46%, while the average economic growth of districts in Kudus regency still many who are under 3.46%. The difference of economic growth in the inter-district Kudus regency indicates a inequality of income Kudus regency. The analytical method used is an analysis index Williamson, Location Quotient (LQ), Shift Share and Typology Klassen.

The results of this study explain that : electricity, gas and water supply sectors including sectors that have the potensial to boost economic growth in the inter-district in Kudus regency. Income inequality in the inter-district in Kudus regency in 2005 until 2009 include high (>0.5) that is equal to 0.76.

Based on these findings suggestions that can be delivered to reduce the income inequality in the inter-district in Kudus regency is to implement development policies that prioritize the inter-districts the are still relatively backward without ignoring the inter-districts that are already developed and grown rapidly.

Keywords : Income inequality, Economic Growth, Kudus regency

ABSTRAKSI

Ketimpangan merupakan permasalahan pembangunan yang belum dapat dihapuskan terutama pada negara sedang berkembang. Kabupaten Kudus memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten-kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus secara keseluruhan cenderung mengalami penurunan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus pada tahun 2005 sampai tahun 2009 sekitar 3,46 % ,sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus masih ada yang dibawah 3,46 %. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus mengindikasikan adanya ketimpangan pendapatan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis Indeks Williamson, *Location Quotient* (LQ), *Shift Share* dan Tipologi Klassen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor Listrik, Gas dan Air Bersih termasuk sektor yang berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus. Ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2005-2009 tergolong tinggi ($> 0,5$) yaitu sebesar 0,76.

Berdasarkan temuan tersebut saran yang dapat disampaikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Kudus adalah menerapkan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan pada kecamatan-kecamatan yang relatif masih tertinggal tanpa mengabaikan kecamatan-kecamatan yang sudah maju dan tumbuh pesat.

Kata kunci : Ketimpangan pendapatan, Pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Kudus

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 – 2009”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, kerja sama, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui lembar halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs.Mohammad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D. ,selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Dra. Hj. Tri Wahyu R, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Drs. Edy Yusuf AG, SE, M.Si, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu selama menjalani kuliah di Fakultas Ekonomika & Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Keluargaku, Papah dan Mamah tercinta (Sulawadi Harto dan Tri Umiyati Harto), kakakku Pinktada tersayang dan Mas Faris untuk dorongan dan perhatian yang tidak pernah habis serta doa yang tidak pernah putus. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.

5. Para Dosen dan seluruh staff yang membantu dalam proses belajar mengajar selama kuliah, yang telah membantu dalam memberikan ilmu dan arahnya kepada penyusun selama melakukan studi di kampus tercinta ini.
6. Sahabat-sahabatku Dhita, Dian, Oyk, Nasrul dan Yudhi makasih untuk semangat super dari kalian, sukses buat semua ya Sahabat!!!
7. Keluarga besar teman-teman IESP angkatan 2006 kalian telah mewarnai proses kehidupan ku dan menjadi bagian dalam fase kehidupan ku terima kasih atas kebersamaan, perhatian, kerja sama, tawa canda dan rasa kekeluargaannya yang telah diberikan dari awal bertemu sampai saat ini dan akan terus berlangsung sampai kapan pun.
8. Ery Purna Yudha yang telah mengisi hari-hariku terima kasih atas waktu, tenaga, dan perasaan yang dikorbankan selama ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Fatimah Yasmine keponakanku tercinta yang menjadi obatku dikala sedang sedih.
10. Personil kost Bunga : Mamah Vina, mba Mini, mba Tiwik, dek Nunung, mba Dina, mba Indun dan personil lainnya makasih untuk semuanya kalian adalah keluarga keduaku.
11. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 26 Juni 2012
Penulis

Crossandra Undulifolia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	8
2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional.....	9

2.1.2.1 Teori Basis Ekonomi	9
2.1.2.2 Analisis <i>Shift Share</i>	11
2.1.2.3 Tipologi Klassen	13
2.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah	16
2.1.2.5 Indeks Williamson	19
2.2 Penelitian Terdahulu	20
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	26
3.2 Jenis dan Sumber Data	27
3.3 Metode Analisis Data	27
3.3.1 Indeks Williamson	27
3.3.2 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ)	29
3.3.3 Analisis <i>Shift Share</i>	30
3.3.4 Analisis Typologi Klassen	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Deskripsi Profil Objek Penelitian	36
4.1.1 Kondisi Geografis	36
4.1.2 Demografis Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus	38
4.2 Profil Perekonomian Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus	39
4.2.1 PDRB dan Laju PDRB Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus	
Tahun 2005-2009.....	39

4.2.2 PDRB Perkapita dan Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	40
4.3 Analisis Data	42
4.3.1 Indeks Williamson.....	42
4.3.2 Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	43
4.3.3 Analisis <i>Shift Share</i>	49
4.3.4 Analisis Typologi Klassen	65
4.4 Interpretasi Hasil.....	82
4.4.1 Analisis Typologi Klassen dengan Pendekatan Wilayah	84
BAB V PENUTUP	86
5.1 Simpulan	86
5.2 Keterbatasan.....	88
5.3 Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Propinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	2
Tabel 1.2 PDRB Kecamatan di Kabupaten Kudus dan Kontribusinya.....	3
Tabel 1.3 PDRB Perkapita Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	21
Tabel 3.1 Pengelompokan Pembangunan Klasifikasi Klassen	33
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	38
Tabel 4.2 PDRB Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	39
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	40
Tabel 4.4 PDRB Pekapita Antar Kecamatan di Kabupeten Kudus Tahun 2005-2009	41
Tabel 4.5 Laju PDRB Perkapita Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	42
Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Indeks Williamson Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	43
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rata-rata LQ Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	44
Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Kaliwungu Tahun 2005-2009	49
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Kota Tahun 2005-2009.....	51
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Jati Tahun 2005-2009.....	53
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Undaan Tahun 2005-2009	54

Tabel4.12	Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Jekulo Tahun 2005-2009.....	56
Tabel4.13	Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Mejobo Tahun 2005-2009	58
Tabel4.14	Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Bae Tahun 2005-2009.....	60
Tabel4.15	Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Gebog Tahun 2005-2009.....	61
Tabel4.16	Hasil Perhitungan Shift Share Kecamatan Dawe Tahun 2005-2009.....	63
Tabel4.17	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Kaliwungu Tahun 2005-2009	65
Tabel4.18	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Kaliwungu Tahun 2005-2009	67
Tabel4.19	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Kota Tahun 2005-2009	68
Tabel4.20	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Kota Tahun 2005-2009.....	69
Tabel4.21	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Jati Tahun 2005-2009	70
Tabel4.22	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Jati Tahun 2005-2009.....	71
Tabel4.23	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Undaan Tahun 2005-2009	71
Tabel4.24	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Undaan Tahun 2005-2009	72
Tabel4.25	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Jekulo Tahun 2005-2009	73
Tabel4.26	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Jekulo Tahun 2005-2009	74

Tabel4.27	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Mejobo Tahun 2005-2009	75
Tabel4.28	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Mejobo Tahun 2005-2009	76
Tabel4.29	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Bae Tahun 2005-2009.....	77
Tabel4.30	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Bae Tahun 2005-2009.....	78
Tabel4.31	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Gebog Tahun 2005-2009.....	78
Tabel4.32	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Gebog Tahun 2005-2009	79
Tabel4.33	Laju Pertumbuhan dan Kontribusi sektor PDRB Kabupaten Kudus dan Kecamatan Dawe Tahun 2005-2009	80
Tabel4.34	Hasil Analisis Typologi Klassen Kecamatan Dawe Tahun 2005-2009	81
Tabel4.35	Hasil Rekapitulasi Analisis Typologi Klassen Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	84
Tabel4.36	Klasifikasi Wilayah Typologi Klassen Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Peta Kecamatan di kabupaten Kudus	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data PDRB, Laju PDRB, PDRB Perkapita dan Laju PDRB Perkapita Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	92
Lampiran B	Indeks Williamson Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	95
Lampiran C	Analisis Location Quotient (LQ) Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	99
Lampiran D	Analisis Shift Share Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	101
Lampiran E	Analisis Typologi Klassen Antar Kecamatan di Kabupaten Kudus Tahun 2005-2009.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Oleh karena itu semua wilayah mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayahnya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kemampuan wilayah dalam menggerakkan sektor-sektor andalannya dalam menopang kegiatan perekonomian. Faktor eksternal lebih diakibatkan oleh perdagangan antar wilayah atau luar negeri, pertumbuhan ekonomi sekitarnya, dan kebijakan pemerintah pusat.

Pemerintah melalui Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional” mengatakan bahwa Perencanaan pembangunan nasional maupun regional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan mengikuti pola tertentu berdasar hasil telaah yang cermat terhadap situasi dan kondisi bagus. Pembangunan yang bersifat menyeluruh dan tuntas perlu dilakukan, sehingga sasaran pembangunan yang optimal dapat tercapai.

Kemampuan setiap daerah untuk membangun daerahnya masing-masing berbeda, karena dipengaruhi oleh adanya perbedaan potensi sumber daya yang dimilikinya seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan

serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan ada daerah yang melimpah sumber daya alam tetapi kurang dalam sumber daya manusia, namun ada daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi melimpah dalam sumber daya manusia, baik secara kualitas maupun kuantitas. Keadaan ini selanjutnya menyebabkan perbedaan dalam perkembangan pembangunan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan kesejahteraan di masing-masing daerah.

Masalah ketimpangan antar daerah atau wilayah juga terjadi di Kabupaten Kudus. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional
Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Propinsi Jawa Tengah dan
Kabupaten Kudus Tahun 2000-2006

Tahun	Propinsi Jawa Tengah		Kabupaten Kudus	
	PDRB (rupiah)	Pertumbuhan (%)	PDRB (rupiah)	Pertumbuhan (%)
2005	123.765.549,17	3,95	10.619.525,78	4,24
2006	129.111.640,60	3,97	10.881.159,81	2,40
2007	135.334.860,66	4,50	11.243.359,39	3,22
2008	141.860.995,31	4,53	11.683.819,75	3,77
2009	148.515.790,19	4,46	12.125.681,78	3,64
Rata-rata	135.717.767,19	4,28	11.310.709,30	3,46

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2009

Berdasarkan Tabel 1.1 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus selama lima tahun (2005-2009) cenderung menurun. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus tertinggi pada tahun 2005 sebesar 4,24%, namun jika dilihat secara rata-rata, laju pertumbuhan Kabupaten Kudus lebih lambat dari pada laju pertumbuhan Propinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.2
PDRB Kecamatan di Kabupaten Kudus
Atas dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2005-2009 (jutaan Rp) dan
Kontribusinya (%)

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
Kaliwungu	2.178.108,47 20,51	2.267.972,91 20,84	2.160.721,54 19,22	2.053.285,26 17,57	2.001.126,36 16,5	2.132.242,91 18,85
Kota	3.279.373,68 30,88	3.325.245,56 30,56	3.478.325,89 30,94	3.654.524,72 31,28	3.834.074,95 31,62	3.514.308,96 31,07
Jati	1.803.650,48 16,98	1.805.645,92 16,59	1.881.100,63 16,73	1.969.210,79 16,85	2.053.138,84 16,93	1.902.549,33 16,82
Undaan	281.460,78 2,65	272.686,41 2,51	281.896,59 2,51	298.452,27 2,55	314.664,45 2,6	289.832,10 2,56
Mejobo	329.277,76 3,1	367.180,78 3,37	369.156,38 3,28	372.033,03 3,18	372.976,29 3,08	362.124,85 3,2
Jekulo	697.809,87 6,57	712.299,49 6,55	787.004,62 7	871.235,17 7,46	958.960,72 7,91	805.461,97 7,12
Bae	583.085,30 5,49	636.529,10 5,85	656.208,69 5,84	679.326,76 5,81	636.773,50 5,25	638.384,67 5,64
Gebog	1.109.491,19 10,45	1.140.764,24 10,48	1.259.458,67 11,2	1.388.292,00 11,88	1.527.838,19 12,6	1.285.168,86 11,36
Dawe	357.268,25 3,36	352.835,40 3,24	369.486,38 3,29	397.459,75 3,4	426.128,48 3,51	380.635,65 3,37

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2009

Pada Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa kecamatan Kota merupakan daerah yang termasuk penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Kudus. Rata-rata kontribusi PDRB terbesar adalah kecamatan Kota sebesar 31,07%. Rata-rata kontribusi terkecil adalah kecamatan Undaan sebesar 2,56%.

Pada Tabel 1.3 , ada beberapa daerah yang PDRB per kapita nya di atas rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Kudus. Daerah tersebut adalah kecamatan Kota, kecamatan Kaliwungu, kecamatan Jati, sedangkan daerah lainnya

pertumbuhan PDRB per kapita nya di bawah rata-rata PDRB per kapita Kabupaten Kudus.

Tabel 1.3
PDRB per kapita antar Kecamatan di Kab Kudus Atas Dasar Harga
Konstan 2000 Tahun 2005-2009 (jutaan Rp)

Kecamatan	2005	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
Kaliwungu	25.246.406,42	26.076.447,10	24.667.178,93	23.260.889,71	22.445.978,89	24.339.380,21
Kota	35.666.688,58	36.245.223,73	37.952.273,74	39.921.399,96	41.945.550,12	38.346.227,23
Jati	20.072.230,39	19.787.466,81	20.281.845,72	20.942.367,27	21.535.593,09	20.523.900,66
Undaan	4.238.675,73	4.080.238,37	4.184.552,87	4.405.199,50	4.620.419,82	4.305.817,26
Mejubo	5.044.160,53	5.568.576,21	5.548.303,61	5.538.843,34	5.487.366,41	5.437.450,02
Jekulo	7.496.560,89	7.599.968,97	8.317.705,08	9.141.067,73	9.898.438,51	8.490.748,24
Bae	9.750.753,42	10.637.895,23	10.874.464,49	11.184.358,62	10.403.775,76	10.570.249,50
Gebog	12.456.955,45	12.698.862,73	13.912.058,69	15.207.825,74	16.543.818,55	14.163.904,23
Dawe	3.865.368,21	3.797.808,50	3.960.748,90	4.227.530,66	4.531.835,40	4.076.658,33
Kab Kudus	14.465.338,56	14.723.470,21	15.098.384,64	15.575.996,46	16.030.016,80	15.178.641,33

Sumber : Badan Pusat Statistik, Tinjauan PDRB Jawa Tengah, 2009

Berdasarkan Tabel 1.3 ada beberapa PDRB kecamatan per kapita yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PDRB Kabupaten Kudus per kapita. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di Kabupaten Kudus yang terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan antar kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN TINGKAT KETIMPANGAN ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005-2009”**.

1.2 Rumusan Masalah

Proses pembangunan di suatu wilayah yang tidak direncanakan dengan baik dapat menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan dan target pertumbuhan ekonomi yang kurang sesuai dengan harapan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis ketimpangan antar wilayah diantaranya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Konsumsi Rumah Tangga Perkapita, Kontribusi Sektoral terhadap PDRB, Tingkat Kemiskinan dan Struktur Fiskal (Emilia dan Imelia , 2006).

Namun cepatnya laju pertumbuhan antar kecamatan di Kabupaten Kudus, terdapat kesenjangan antar pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan tingkat kesejahteraan (PDRB per kapita) di Kabupaten Kudus. Artinya tingkat pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus yang tinggi belum tentu diikuti dengan keberhasilan dalam mendistribusikan pendapatan masyarakat antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis besarnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus.
2. Menganalisis sektor potensial antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang dari antar kecamatan di Kabupaten Kudus, rumusan masalah tentang ketimpangan yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Kudus, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Menyajikan landasaan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang adanya ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini dipaparkan tentang definisikan operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk

mencapai tujuan penelitian tentang ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini dipaparkan tentang deskripsi obyek penelitian, analisis tentang ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus dan pembahasan tentang tingkat ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

BAB V Penutup

Pada bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini serta beberapa saran bagi pihak yang berkepentingan dalam masalah pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2004), dengan formula :

$$Y_t = \frac{PDRB\ riil_t - PDRB\ riil_{t-1}}{PDRB\ riil_{t-1}} \times 100 \dots \dots \dots (2 - 1)$$

Keterangan :

- Yt = Pertumbuhan Ekonomi
- PDRB riil = Pendapatan Domestik Regional Bruto Riil
- t = Periode Tahun

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Regional

Penekanan pertumbuhan ekonomi regional lebih dipusatkan pada pengaruh perbedaan karakteristik *space* terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor yang menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional (Robinson Tarigan,2006) :

1. Keuntungan Lokasi.
2. Aglomerasi Migrasi.
3. Arus lalu lintas modal antar wilayah.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi teori pertumbuhan ekonomi nasional adalah :

1. Modal.
2. Lapangan Kerja.
3. Kemajuan Tehnologi

2.1.2.1 Teori Basis Ekonomi.

Merupakan teori yang menjelaskan perubahan-perubahan regional, dengan menekankan hubungan antar sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian regional. Yang paling sederhana adalah teori basis ekonomi, konsep dasar ekonomi membagi perekonomian regional menjadi 2 sektor , yaitu : sektor basis dan sektor non basis (Robinson Tarigan,2006).

- 1) Sektor Basis adalah sektor-sektor yang mengekspor barang dan jasa ke tempat diluar perbatasan perekonomian masyarakat atau memasarkan barang dan jasa kepada orang yang datang dari luar batas perekonomian masyarakat bersangkutan.

2) Sektor non basis adalah sektor-sektor yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh orang-orang dalam batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian kegiatan basis mempunyai peran penting sebagai penggerak utama.

Pendekatan secara tidak langsung untuk memisahkan kegiatan basis dan non basis dapat menggunakan metode Location Quotient (LQ). Teknik analisa LQ merupakan cara permulaan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam sektor kegiatan tertentu. Pada dasarnya teknik ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah yang diteliti dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas. Perbandingan relative ini dinyatakan secara matematis sebagai berikut :

$$LQ = \frac{(S_i / S)}{(N_i / N)} \text{ atau } \frac{(S_i / N_i)}{(S / N)}$$

Sumber : Tarigan, 2005

Keterangan :

LQ = Besarnya Location Quotient

S_i = Nilai tambah sektor di tingkat Kabupaten i

S = PDRB di Kabupaten i

N_i = Nilai tambah sektor di tingkat Propinsi

N = PDRB di tingkat Propinsi.

Adapun kesimpulan yang dapat diambil untuk menentukan sektor basis atau non basis dapat dilihat nilai LQnya. $LQ > 1$ berarti bahwa daerah tersebut mempunyai potensi ekspor dalam kegiatan tertentu (sektor basis). Jika $LQ = 1$

berarti bahwa daerah tersebut telah mencukupi dalam kegiatan tertentu. Apabila $LQ < 1$ berarti bahwa daerah tersebut mempunyai impor dalam kegiatan tertentu.

2.1.2.2 Analisis Shift Share

Teknik analisis Shift Share ini menggambarkan *performance* (kinerja) sektor-sektor di suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian nasional. Ditunjukkan dengan adanya *shift* (pergeseran) hasil pembangunan perekonomian daerah bila daerah itu memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian. Perbandingan laju pertumbuhan sektorsektor di suatu wilayah terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional serta sektorsektornya dan mengamati penyimpangan-penyimpangan dari perbandingan-perbandingan itu dapat ditentukan keunggulan kompetitif dari suatu sektor dalam wilayah, seandainya penyimpangan tersebut bernilai positif (Supomo, 1993).

Metode ini lebih tajam dibandingkan dengan metode LQ, karena analisis *shift share* memperinci penyebab perubahan atas beberapa variabel. Analisis ini menggunakan metode pengisolasian berbagai faktor yang menyebabkan perubahan struktur industri suatu daerah dalam pertumbuhannya dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya. Hal ini meliputi penguraian faktor penyebab pertumbuhan berbagai sektor di suatu daerah tetapi dalam kaitannya dengan ekonomi nasional (Robinson Tarigan, 2003: 85).

Menurut Arsyad (1997; 290) penggambaran tentang kinerja perekonomian daerah terbagi dalam tiga bidang yang saling berhubungan satu sama lain yaitu :

- a. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan

dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian tingkat nasional.

- b. Pergeseran proporsional (*Proportional Shift*) mengukur perubahan relatif pertumbuhan atau penurunan perekonomian dibandingkan dengan perekonomian nasional. Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat daripada sektor perekonomian nasional
- c. Pergeseran diferensial (*Differential Shift*) menentukan seberapa jauh daya saing sektor daerah (lokal) dengan perekonomian nasional.

Pertumbuhan sebagai perubahan (Δ) suatu variabel wilayah dalam kurun waktu tertentu yang terdiri atas perubahan sebagai akibat dari pengaruh pertumbuhan daerah ditingkat atasnya (N), bauran industri (M) dan keunggulan kompetitif atau persaingan (C). Pengaruh pertumbuhan daerah di atasnya disebut pangsa (*share*), pengaruh bauran industri disebut *proporsional shift* dan pengaruh persaingan (keunggulan kompetitif) disebut *differential shift* atau *regional share*. Pengaruh bauran industri (M_{ij}) yaitu suatu wilayah mempunyai industri-industri yang menguntungkan dan tumbuh lebih cepat daripada laju pertumbuhan daerah di atasnya. Untuk pengaruh persaingan yaitu bila suatu industri tertentu di wilayah tertentu tumbuh lebih cepat disuatu wilayah daripada industri yang sama ditingkat yang lebih tinggi.

2.1.2.3 Tipologi Klassen

Tipologi *Klassen* merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, atau komoditi prioritas atau unggulan suatu daerah. Alat analisis ini dapat digunakan melalui dua pendekatan (Syafriзал, 1997). Pertama adalah dengan pendekatan sektoral, dimana merupakan perpaduan antara analisis LQ dengan model rasio pertumbuhan (Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM, 2006). Tipologi *Klassen* dengan pendekatan sektoral menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut:

1. Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (Kuadran I).

Kuadran ini merupakan kuadran sektor dengan laju pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang lebih luas (g) dan nilai $LQ > 1$. Sektor dalam kuadran I dapat pula diartikan sebagai sektor yang dominan karena memiliki kinerja laju pertumbuhan ekonomi dan pangsa yang lebih besar daripada daerah yang lebih luas

2. Sektor maju tapi tertekan (Kuadran II).

Sektor yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas (g), tetapi memiliki nilai $LQ > 1$. Sektor dalam kategori ini juga dapat dikatakan sebagai sektor yang telah jenuh.

3. Sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III).

Kuadran ini merupakan kuadran untuk sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah

yang tinggi tingkatnya (g), nilai LQnya <1 . Sektor dalam Kuadran III dapat diartikan sebagai sektor yang sedang *booming*.

4. Sektor relatif tertinggal (Kuadran IV).

Kuadran ini ditempati oleh sektor yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (gi) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang lebih luas (g) dan sekaligus memiliki nilai $LQ < 1$. Pendekatan yang kedua adalah dengan pendekatan wilayah/daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Syafrizal untuk mengetahui klasifikasi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita daerah. Dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal.

Kedua, pendekatan wilayah juga menghasilkan empat klasifikasi kabupaten yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda yaitu :

1. Daerah tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth region* / Kuadran I)

Daerah maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya daerah-daerah tersebut merupakan daerah yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya daerah-daerah ini merupakan daerah yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara

baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region* / Kuadran II).

Daerah maju tapi tertekan (*Retarded Region*) adalah daerah-daerah yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Walaupun daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran III).

Daerah berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dimasa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju.

4. Daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran IV).

Kemudian daerah relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan

per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa didaerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat setempat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya (Syafrizal, 1997; 27).

2.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Wilayah

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antar daerah (Mudrajat Kuncoro, 2004).

Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan. Kuznets (1954) tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Kuznets meneliti kesenjangan di berbagai negara secara *cross-sectional* dan menemukan pola U terbalik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata perkapita pada awal perkembangan negara masih rendah, dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali.

Menurut Myrdal (Sadono Sukirno, 1985) melakukan penelitian tentang sistem kapitalis yang menekankan kepada tingkat keuntungan bagi suatu wilayah yang memberikan harapan tingkat keuntungan tinggi akan berkembang menjadi pusat-pusat perkembangan kesejahteraan. Perbedaan tingkat kemajuan ekonomi antar daerah yang berlebihan akan menyebabkan pengaruh yang merugikan (*backwash effects*) mendominasi pengaruh yang menguntungkan (*spread effects*) terhadap pertumbuhan daerah, dalam hal ini mengakibatkan proses ketidakseimbangan.

Irma Adelman dan Cynthia Taft Morris tahun 1973 (Lincoln Arsyad, 1997) menyatakan bahwa faktor penyebab ketimpangan pendapatan di negara sedang berkembang adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan turunnya pendapatan perkapita.
2. Inflasi. Dimana penerimaan pendapatan yang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertumbuhan produksi barang-barang.
3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*).
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang menyebabkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi golongan kapitalis.

7. Memburuknya nilai tukar bagi mata uang negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara maju sebagai akibat ketidakelastisan barang-barang ekspor dari negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga dan lain-lain.

Tambunan (2001) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah antara lain :

- a. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah.
- b. Alokasi Investasi. Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi, dengan kata lain bahwa kurangnya investasi disuatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat perkapita di wilayah tersebut rendah, karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.
- c. Tingkat Mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional.
- d. Perbedaan Sumberdaya Alam antar daerah. Dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumberdaya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumberdaya alam.

- e. Perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Faktor-faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran.
- f. Kurang lancarnya perdagangan. Kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidاكلancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.

2.1.2.5 Index Williamson

Index Williamson yang diperkenalkan oleh Williamson dalam tulisannya Tahun 1966 merupakan metode untuk mengukur ketidakmerataan regional. Metode ini diperoleh dari perhitungan perkapita dan jumlah penduduk di suatu negara. Secara sistematis perhitungan Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \frac{f_i}{n}}}{Y}$$

Dimana :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita di Kabupaten/kota i

Y = PDRB perkapita di Provinsi Jawa Tengah

f_i = Jumlah penduduk di Kabupaten/kota i

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Besarnya Index Williamson ini bernilai positif dan berkisar antara angka nol sampai dengan satu. Semakin besar nilai index ini (mendekati angka satu) berarti semakin besar tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut. Sebaliknya semakin kecil nilai index ini (mendekati angka nol) berarti semakin merata tingkat pemerataan pendapatan antar daerah dalam wilayah tersebut.

Oshima menetapkan kriteria untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan antar daerah, apakah ada ketimpangan tinggi, sedang atau rendah. Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut (BPS, Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Penduduk Jawa Tengah, 2000).

- Ketimpangan Tinggi jika $IW > 0,5$
- Ketimpangan Sedang jika $IW = 0,35 - 0,5$
- Ketimpangan Rendah jika $IW < 0,35$.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain. Penelitian mengenai Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2004) melakukan penelitian tentang Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan alat analisis Indeks Williamson. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks

Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal. Selengkapnya penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Alat Analisis	Hasil
1.	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 1997. (Syafrizal, 1997)	<ul style="list-style-type: none"> •PDRB •PDRB perkapita •Jumlah Penduduk •Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •Tipologi Klassen •Indeks Williamson 	<p>Dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum angka ketimpangan regional untuk wilayah Indonesia bagian barat ternyata lebih rendah dibandingkan dengan angka ketimpangan untuk Indonesia secara keseluruhan.</p> <p>Hasil dari Tipologi Klassen yang termasuk daerah maju dan tumbuh cepat adalah Sumatra Utara, Riau dan Kalimantan Barat. Daerah berkembang cepat adalah Lampung. Daerah maju tapi tertekan adalah Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Selatan. Sedangkan daerah yang relative tertinggal adalah Jambi dan Bengkulu</p>
2.	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> •PDRB •PDRB perkapita •Jumlah Penduduk •Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •Indeks Williason •Shift share 	<p>1. Berdasarkan indeks Williamson, kabupaten Kebumen dapat dikatakan mengalami pemerataan tingkat pendapatan dengan rata-rata 0,385 masih diambang kritis 0,5</p> <p>2. Dari proporsional shift component (Pj) menunjukkan adanya enam sektor yang tumbuh relatif cepat</p>

Tabel 2.1 (lanjutan)

	Kebumen Tahun 1996-2000. (Ahmad Salihabor, 2002)			pada tingkat kecamatan daripada di tingkat kabupaten. 3. Terdapat enam kecamatan (tipe IV)
3.	Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 1993-2003. (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2004)	<ul style="list-style-type: none"> •PDRB •PDRB perkapita •Jumlah Penduduk •Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •Indeks Williamson •Indeks Entropy Theil • Tipologi Klassen 	<p>1. Berdasarkan tipologi Klassen, daerah/kecamatan di Kabupaten Banyumas dapat diklasifikasikan berdasarkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita menjadi empat kelompok yaitu kecamatan cepat maju dan cepat tumbuh, kecamatan yang maju tapi tertekan, kecamatan yang berkembang cepat dan kecamatan tertinggal.</p> <p>2. Pada periode pengamatan 1993–2000 terjadi kecenderungan peningkatan ketimpangan, baik dianalisis dengan indeks Williamson maupun dengan indeks entropi Theil. Ketimpangan ini salah satunya diakibatkan konsentrasi aktivitas ekonomi secara spasial.</p> <p>3. Hipotesis Kuznets berlaku di Kab Banyumas</p>
4.	Analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan di Kabupaten Semarang Periode 2000-2004. (Widya Puspita Ayu, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> •PDRB •PDRB perkapita •Jumlah Penduduk •Laju pertumbuhan ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> •Tipologi Klassen •LQ •Shift share •Indeks Williamson •Indeks Theil 	<p>1. Hasil dari Tipologi Klassen adalah kecamatan yang termasuk pada kuadran I yaitu Kec. Pringapus dan Kec. Bergas. Pada kuadran II yaitu Kec. Ungaran dan Kec. Pabelan. Kuadran III terdapat Kec. Tuntang, Kec. Jambu dan Kec. Ungaran. Sedangkan kuadran IV yaitu Kec. Suruh, Kec. Banyubiru, Kec. Ambarawa, Kec. Bawen, Kec. Sumowono, Kec. Getasan, Kec. Bringin, Kec. Bancak, Kec. Kaliwungu, dan Kec. Susukan</p> <p>2. Nilai rata-rata indeks Williamson kabupaten Semarang adalah 0,533, sedangkan nilai rata-rata indeks entropi Theil sebesar 18,344.</p> <p>3. LQ tiap kecamatan di Kabupaten</p>

Tabel 2.1 (lanjutan)

				Semarang kebanyakan bersektor basis pada pertanian, sedangkan sektor industri merupakan sektor basis di empat kecamatan saja, dari 17 kecamatan di Kabupaten Semarang 4. Hasil Analisis Shift Share diketahui terdapat 6 sektor yang mempunyai nilai $P_j > 0$ merata di kecamatan Kabupaten Semarang, sektor tersebut adalah sektor industri, sektor, listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor angkutan, dan sektor jasa
5.	Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Wilayah Kecamatan Di Kabupaten Kebumen Tahun 2000-2006. (Teguh Prayitno, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> •PDRB •PDRB Perkapita •Jumlah Penduduk •Laju pertumbuhan 	<ul style="list-style-type: none"> •Tipologi Klassen •Indeks Williamson 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan indeks Williamson menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah pemekaran, tingkat ketimpangan di kabupaten Kebumen adalah rendah. 2. Kebanyakan kecamatan di kabupaten Kebumen berada pada daerah relatif tertinggal (tipologi IV).

2.3 Kerangka Pemikiran

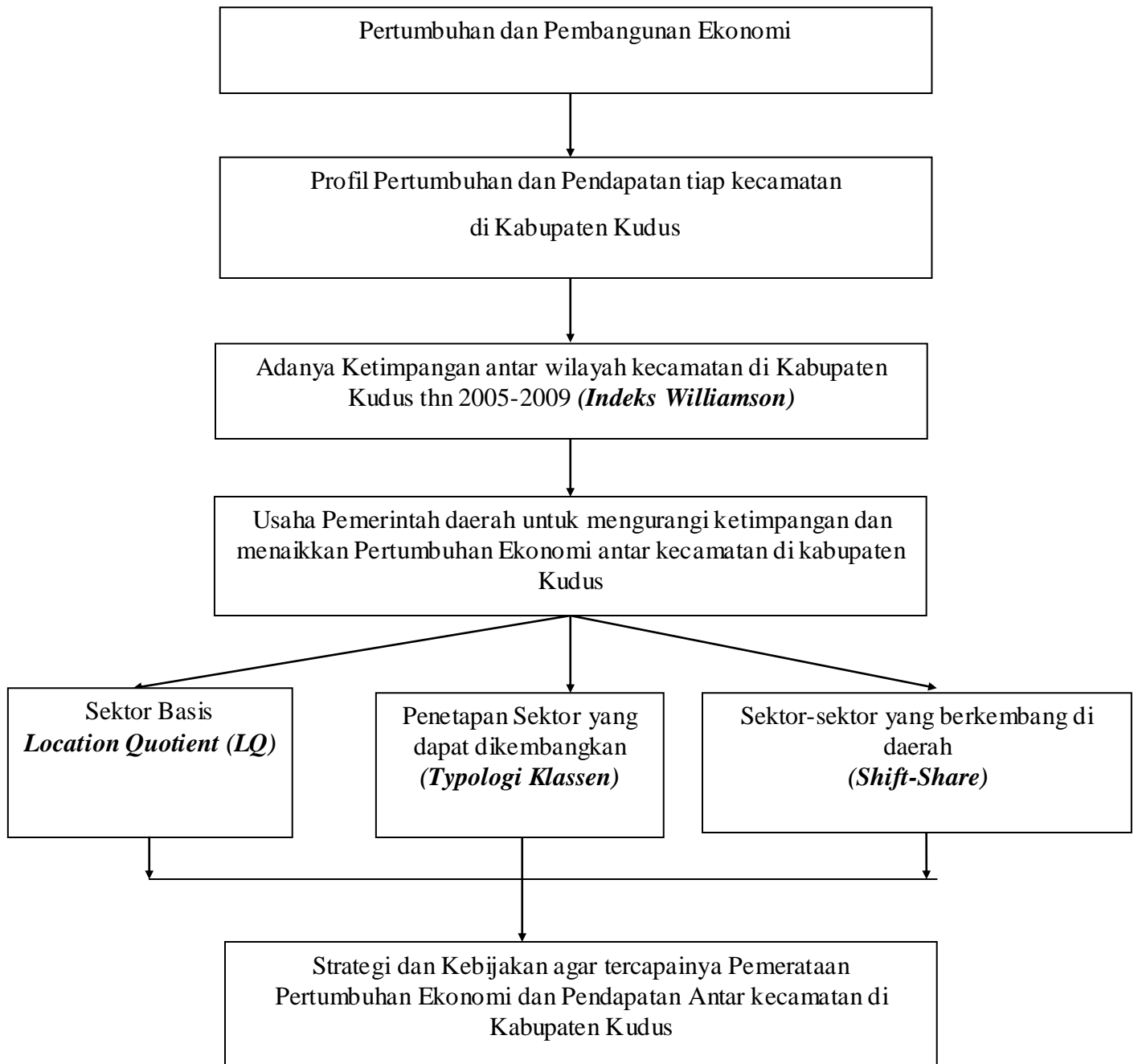
Pembangunan ekonomi daerah merupakan salah satu bagian penting dari pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor.

Ketimpangan pendapatan antar Kecamatan merupakan masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Kajian pertumbuhan ekonomi dan tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antar Kecamatan di Kabupaten Kudus, dilihat

melalui PDRB dan pendapatan perkapitanya. PDRB merupakan indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi daerah (proses perubahan perekonomian yang dapat di lihat dari semakin meningkatnya kegiatan ekonomi dari berbagai sektor). Dengan demikian, dapat dicermati laju pertumbuhan ekonominya (proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional). Sedangkan pendapatan perkapita merupakan hasil bagi PDRB dengan jumlah penduduk yang dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Analisis Indeks Williamson digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pertumbuhan ekonomi dari unsur PDRB antar kecamatan di Kabupaten Kudus.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber : Syafrizal (1997) dengan modifikasi sesuai dengan objek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel adalah subyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto 1998). Variabel dalam penelitian ini meliputi :

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah laju kenaikan nilai PDRB riil pada tiap tahun yang terjadi antar kecamatan di Kabupaten Kudus. Satuan yang digunakan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase.

2. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan Pendapatan adalah perbedaan pendapatan pada suatu daerah dengan daerah lain yang berada dalam kawasan tertentu. Satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan adalah angka Indeks Williamson.

Definisi Operasional adalah penentuan konstrak sehingga dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalkan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau dengan mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini seluruhnya adalah data sekunder untuk periode 2005-2009. Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah :

1. PDRB atas dasar harga konstan 2000 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.
2. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.
3. PDRB perkapita atas dasar harga konstan 2000 kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2005-2009.
4. Jumlah penduduk masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus tahun 2005-2009.
5. Jumlah penduduk Propinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.
6. Data Geografis dan data-data yang mendukung penelitian ini.

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Indeks Williamson

Indeks Williamson digunakan untuk menentukan besarnya ketimpangan pendapatan. Williamson meneliti hubungan antara ketimpangan regional dengan tingkat pembangunan ekonomi menggunakan data ekonomi negara maju dan negara berkembang. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, ketimpangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi di daerah – daerah tertentu. Pada tahap yang lebih matang dari

pertumbuhan ekonomi tampak adanya keseimbangan antar daerah dan ketimpangan berkurang dengan signifikan. Metode ini diperoleh dari perhitungan pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah. Rumus Indeks Williamson (Mudrajad Kuncoro, 2004) :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \cdot \frac{f_i}{n}}}{Y} \dots\dots\dots (3-1)$$

Keterangan :

IW = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita (dalam penelitian ini adalah tiap kecamatan)

Y = PDRB perkapita (Kabupaten Kudus)

f_i = Jumlah penduduk (dalam penelitian ini adalah tiap kecamatan)

n = Jumlah penduduk (Kabupaten Kudus)

Nilai Indeks Williamson berkisar antara 0 – 1 (positif). Semakin besar nilai indeksnya, maka semakin besar juga tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah. Sebaliknya, semakin kecil nilai indeksnya, maka semakin kecil pula tingkat ketimpangan yang terjadi di wilayah tersebut. Ketidakmerataan tinggi terjadi pada nilai indeks diatas 0,50. Sedangkan ketidakmerataan dikatakan rendah apabila nilai indeksnya dibawah 0,50.

3.3.2 Analisis *Location Quotient* (LQ)

Metode Location Quotient (Robinson Tarigan,2005) digunakan untuk mengetahui sektor basis atau potensial suatu daerah tertentu. Metode ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan sektor di daerah (kecamatan)

dengan kemampuan sektor yang sama pada daerah yang lebih luas (Kabupaten Kudus).

$$LQ = \frac{Si / S}{Ni / N} \dots\dots\dots (3-2)$$

Keterangan :

Si = Nilai tambah sektor i di kecamatan

S = PDRB di kecamatan

Ni = Nilai tambah sektor i di Kabupaten Kudus

N = PDRB (Kabupaten Kudus)

Dari perhitungan LQ, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jika nilai $LQ > 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor basis. Sektor tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan di dalam daerah saja namun juga kebutuhan di luar daerah karena sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan.
2. Jika nilai $LQ = 1$, maka sektor tersebut hanya cukup memenuhi kebutuhan di daerahnya saja.
3. Jika nilai $LQ < 1$, maka sektor tersebut merupakan sektor non basis dan perlu impor produk dari luar daerah karena sektor ini kurang prospektif untuk dikembangkan.

3.3.3 Analisis *Shift Share*

Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah. Pendekatan analisis ini untuk mengidentifikasi sektor unggulan suatu daerah dengan cara membandingkan nilai sektor suatu daerah yang berada lebih rendah (kecamatan) dengan nilai sektor di daerah yang lebih tinggi (kabupaten)

Analisis *Shift Share* menggunakan tiga informasi dasar yang berhubungan satu sama lain, yaitu :

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus (*regional share*)

Menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terhadap perekonomian di tiap kecamatan. Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus positif jika pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan tumbuh lebih cepat . Nilai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus negatif jika pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan tumbuh lebih lambat atau merosot dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus.

2. Pergeseran Proporsional (*proportional shift*)

Menunjukkan perubahan relatif kinerja suatu sektor di daerah tertentu (kecamatan) terhadap sektor yang sama di daerah yang lebih tinggi (Kabupaten Kudus). Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*). Pengukuran ini memungkinkan untuk mengetahui apakah perekonomian terkonsentrasi pada industri-industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian

yang dijadikan acuan. Komponen ini positif di tiap kecamatan yang berspesialisasi dalam sektor-sektor di daerah yang lebih tinggi (Kabupaten Kudus) tumbuh dengan lambat atau merosot.

3. Pergeseran differensial (*differential shift*)

Menunjukkan informasi dalam menentukan seberapa jauh daya saing tiap sektor daerah yang lebih rendah (kecamatan) dengan sektor yang berada di daerah yang lebih tinggi (Kabupaten Kudus). Jika pertumbuhan suatu sektor positif, maka sektor tersebut relatif lebih tinggi daya saingnya dibandingkan dengan sektor yang sama pada daerah yang lebih tinggi (Kabupaten Kudus). Pergeseran differensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif. Jika nilai komponen ini positif, maka sektor tersebut sektor yang kompetitif karena mempunyai keuntungan lokasional seperti sumber daya yang melimpah, sedangkan daerah yang secara lokasional tidak menguntungkan akan mempunyai nilai negatif dan mengalami penurunan *competitiveness*.

Menurut Tri Widodo (2006) bentuk umum persamaan dari analisis shift share dan komponen-komponennya adalah :

$$\text{➤ } D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \quad \dots\dots\dots (3-3)$$

$$\text{➤ } N_{ij} = E_{ij} \times R_n \quad \dots\dots\dots (3-4)$$

$$\text{➤ } M_{ij} = E_{ij} (R_{in} - R_n) \quad \dots\dots\dots (3-5)$$

$$\text{➤ } C_{ij} = E_{ij} (R_{ij} - R_{in}) \quad \dots\dots\dots (3-6)$$

Keterangan :

i = sektor-sektor yang diteliti

j = wilayah yang teliti (kecamatan)

D_{ij} = Dampak nyata pertumbuhan ekonomi di tiap kecamatan dari pengaruh pertumbuhan Kabupaten Kudus

N_{ij} (*regency share*) = pengaruh pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus terhadap perekonomian di tiap kecamatan

C_{ij} (*Differential Shift*) = pengaruh keunggulan kompetitif suatu sektor tertentu di tiap kecamatan

E_{ij} = Nilai tambah sektor i di wilayah j (kecamatan)

R_{ij} = Tingkat pertumbuhan sektor i (tiap kecamatan)

R_{in} = Tingkat pertumbuhan sektor i (Kabupaten Kudus)

R_n = tingkat pertumbuhan PDRB (Kabupaten Kudus)

3.3.4 Analisis Typologi Klassen

Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah dan pendekatan sektor. Kabupaten/ kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafrizal, 1997).

Tabel 3.1
Pengelompokan pembangunan Klasifikasi Klassen

<p>Kuadran II Maju tapi Tertekan (Stagnant Sector)</p> <p>$y_1 < y; r_1 > r$ $S_i < S$ dan $S_{ki} > SK$</p>	<p>Kuadran I Maju dan Tumbuh Pesat (Developed Sector)</p> <p>$y_1 > y; r_1 > r$ $S_i > S$ dan $S_{ki} > SK$</p>
<p>Kuadran IV Terbelakang (Undeveloped Sector)</p> <p>$y_1 < y; r_1 < r$ $S_i < S$ dan $S_{ki} < SK$</p>	<p>Kuadran III Berkembang (Developing Sector)</p> <p>$y_1 > y; r_1 < r$ $S_i > S$ dan $S_{ki} < SK$</p>

Sumber : Syafrizal, 1997

Keterangan :

- y_1 = pendapatan perkapita di kecamatan
- y = pendapatan perkapita Kabupaten Kudus
- r_1 = laju pertumbuhan PDRB tiap kecamatan
- r = laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Kudus
- S_i = Nilai sektor i di kecamatan
- S = PDRB Kabupaten Kudus
- S_{ki} = Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB kecamatan
- SK = Kontribusi nilai sektor i terhadap PDRB Kabupaten Kudus

1. Daerah/sector tumbuh maju dan cepat (*Rapid Growth region* / Kuadran I)

Daerah/sector maju dan cepat tumbuh (*Rapid Growth Region*) adalah daerah/ kecamatan yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus. Pada dasarnya kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang paling maju, baik dari segi tingkat pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya kecamatan ini merupakan kecamatan yang mempunyai potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan

secara baik untuk kemakmuran masyarakat setempat. Karena diperkirakan kecamatan ini akan terus berkembang dimasa mendatang.

2. Daerah/ sektor maju tapi tertekan (*Retarted Region* / Kuadran II)

Daerah/ sektor maju tapi tertekan (*Retarted Region*) adalah daerah/kecamatan yang relatif maju tetapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya menurun akibat tertekannya kegiatan utama kecamatan yang bersangkutan. Karena itu, walaupun kecamatan ini merupakan kecamatan telah maju tetapi dimasa mendatang diperkirakan pertumbuhannya tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya sangat besar.

3. Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region* / Kuadran III)

Daerah/sektor berkembang cepat (*Growing Region*) pada dasarnya adalah daerah/kecamatan yang memiliki potensi pengembangan sangat besar, tetapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonominya tinggi namun tingkat pendapatan per kapitanya, yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan lain. Karena itu dimasa mendatang kecamatan ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketinggalannya dengan kecamatan maju.

4. Daerah/sektor relatif tertinggal (*Relatively Backward Region* / Kuadran IV)

Kemudian daerah/sektor relatif tertinggal (*Relatively Backward Region*) adalah daerah/kecamatan yang mempunyai tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang berada dibawah rata-rata dari seluruh

kecamatan. Ini berarti bahwa baik tingkat kemakmuran masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi di kecamatan ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa di kecamatan ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Kecamatan yang memiliki tingkat kemakmuran yang relatif rendah dapat mengejar ketertinggalannya melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat.